

EFISIENSI ANGGARAN DI ERA PEMERINTAHAN BARU: PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP DAMPAKNYA BAGI PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN

Ardina Febriyanti¹, Annisa Aulia², Syahrani Anggitasari³, Ramzi Zahid Muzhaffar⁴, Joko Tri Nugraha⁵

Ardina Febriyanti, ardina.febriyanti@students.untidar.ac.id, Universitas Tidar¹

Annisa Aulia, annisa.aulia12@students.untidar.ac.id, Universitas Tidar²

Syahrani Anggitasari, syahrani.anggitasari@students.untidar.ac.id, Universitas Tidar³

Ramzi Zahid Muzhaffar, ramzi.zahid.muzhaffar@students.untidar.ac.id, Universitas Tidar⁴

Joko Tri Nugraha, jokotrinugraha@untidar.ac.id, Universitas Tidar⁵

Abstract

This study discusses students' perceptions of the budget efficiency policy implemented in the era of the new government, focusing on its impact on the education and welfare sectors. Budget efficiency has become a strategic issue in state financial governance; however, its implementation often generates both pros and cons, especially in public services such as education. This research employs a quantitative descriptive method with a survey approach targeting active K3 students of the 2024 cohort in Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences. The instrument used is a Likert scale-based questionnaire that encompasses aspects of understanding, attitudes, and perceptions of students towards the policy. The results show that the majority of respondents have a skeptical, even negative perspective toward the budget efficiency policy. As many as 75.8% respondents expressed disagreement or strong disagreement with the policy, mainly because it is considered to reduce the quality of educational services, does not guarantee equitable access to education, and does not involve community aspirations in its formulation process. Furthermore, the majority of students feel that the benefits of this policy have not been felt significantly by them as recipients of educational services. These findings indicate that the implementation of budget efficiency policies needs to be evaluated, both in terms of planning and execution, to achieve efficiency goals without sacrificing the quality and equity of public services. This study recommends an increase in transparency, public participation, and government communication to make the adopted policies more responsive to community needs.

Keywords: Budget Efficiency; Public Policy; Student Perceptions; Education; Welfare.

Abstrak

Penelitian ini membahas persepsi mahasiswa terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di era pemerintahan baru, dengan fokus pada dampaknya terhadap sektor pendidikan dan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman, sikap, dan persepsi mahasiswa terhadap kebijakan efisiensi anggaran, serta sejauh mana mereka merasakan dampaknya secara langsung terhadap akses dan kualitas layanan pendidikan. Efisiensi anggaran menjadi isu strategis dalam tata kelola keuangan negara, namun implementasinya seringkali menimbulkan pro dan kontra, terutama dalam pelayanan publik seperti pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei terhadap mahasiswa aktif K3, Prodi Administrasi Negara Angkatan 2024, FISIPOL. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner berbasis skala Likert yang mencakup aspek pemahaman, sikap, dan persepsi mahasiswa terhadap kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pandangan skeptis bahkan cenderung negatif terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Sebanyak 75,8% responden menyatakan tidak setuju

atau sangat tidak setuju dengan kebijakan tersebut, terutama karena dianggap mengurangi kualitas layanan pendidikan, tidak menjamin pemerataan akses pendidikan, dan tidak melibatkan aspirasi masyarakat dalam proses perumusannya. Selain itu, mayoritas mahasiswa merasa bahwa manfaat kebijakan tersebut belum dirasakan secara nyata oleh mereka sebagai penerima layanan pendidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan efisiensi anggaran perlu dievaluasi, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya, agar tetap dapat mencapai tujuan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas dan pemerataan layanan publik. Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan transparansi, partisipasi publik, dan komunikasi pemerintah agar kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Efisiensi Anggaran; Kebijakan Publik; Persepsi Mahasiswa; Pendidikan; Kesejahteraan.

Received	:	25 May 2025
Accepted	:	29 May 2025
Published	:	31 May 2025
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. LATAR BELAKANG

Efisiensi adalah konsep penting dalam manajemen dan administrasi yang merujuk pada kemampuan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Dalam konteks organisasi, efisiensi berarti memaksimalkan *output* dengan *input* yang tersedia secara optimal. Efisiensi juga didefinisikan sebagai kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan optimal tanpa membuang waktu, tenaga, atau anggaran. Suatu program dapat dikatakan efisien apabila prosesnya berjalan dengan penggunaan sumber daya yang minim namun menghasilkan suatu dampak atau manfaat yang diharapkan atau sesuai dengan yang telah direncanakan (Astuti, 2019).

Saat ini, efisiensi anggaran telah menjadi suatu masalah yang vital dalam pengelolaan keuangan dalam sektor publik di Indonesia. Selain itu, kebijakan anggaran saat ini, tengah menjadi perhatian publik. Pasalnya, kebijakan tersebut berimplikasi langsung terhadap kualitas pelayanan publik, yang mana hal tersebut berpotensi memberikan dampak buruk bagi kualitas layanan publik di Indonesia. Salah satu sektor pelayanan publik yang paling terdampak adalah sektor pendidikan, di mana pemangkasan anggaran terjadi secara signifikan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya kualitas pendidikan dan kesejahteraan, seperti penurunan mutu pendidikan, terutama dalam hal fasilitas, tenaga pengajar, serta kesejahteraan akses pendidikan yang merata. Dampak kebijakan tersebut akan dirasakan langsung oleh kalangan mahasiswa selaku penerima layanan pendidikan sehingga hal tersebut memunculkan berbagai respons kritis dari para mahasiswa dan akademisi.

Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat memiliki peran penting dalam partisipasi menyampaikan argumen, pendapat, aspirasi, dan pandangannya terhadap kebijakan publik, termasuk kebijakan efisiensi anggaran di era pemerintahan yang baru saat ini (Riswandi, 2020). Sebagai kelompok yang berpendidikan dan memiliki peran sebagai *agent of change*, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan memberikan pandangan yang konstruktif terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Persepsi mahasiswa terhadap kebijakan efisiensi anggaran di masa pemerintahan yang baru sangat penting karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas, keberlanjutan, dan dampak, terutama dampak sosial dari kebijakan tersebut terhadap kelompok rentan, seperti mahasiswa penerima bantuan pendidikan (Hafidzah et al., 2024).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan dan menganalisis persepsi, sikap, serta tanggapan dari mahasiswa terhadap kebijakan efisiensi

anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Melalui pendekatan kuantitatif, data yang didapatkan akan diolah secara statistik guna memperoleh gambaran umum yang obyektif kepada fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini kami menentukan populasi dari mahasiswa aktif K3, Prodi Administrasi Negara Angkatan 2024, FISIPOL, yang memiliki ketertarikan atau keterlibatan dalam isu-isu kebijakan publik. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang disebar melalui Google Form yang mencakup beberapa indikator utama, antara lain pemahaman mahasiswa terhadap kebijakan efisiensi anggaran, sikap mereka dalam menyikapi kebijakan, serta persepsi mereka terhadap dampak kebijakan efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial. Jumlah sampel ditentukan menggunakan Rumus Slovin, hasil perhitungan sampel sebanyak 33 responden dengan *margin of error* sebesar 10%.

Penelitian ini menggunakan jenis skala Linkert, yang mana jenis ini menggunakan rentang nilai tertentu untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap suatu pernyataan atau pertanyaan. Responden diminta untuk memberikan tanggapan berdasarkan tingkat persetujuan mereka yang biasanya disajikan dalam rentang pilihan yaitu di antaranya (1) Sangat Setuju diberi skor 5, (2) Setuju diberi skor 4, (3) Netral diberi skor 3, (4) Tidak Setuju diberi skor 2, (5) Sangat Tidak Setuju diberi skor 1 (Awaludin et al., 2023).

3. HASIL

Tabel 1.1 Frekuensi Jenis Kelamin Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki laki	16	48,5	48,5	48,5
	Perempuan	17	51,5	51,5	100
	Total	33	100	100	

Berdasarkan hasil penelitian, responden terdiri dari 16 orang laki-laki (48,5%) dan 17 orang perempuan (51,5%). Total sample yang diambil sebanyak 33 responden. Dengan demikian, komposisi responden didominasi oleh perempuan meskipun selisihnya relatif kecil.

Tabel 1.2 Frekuensi Usia Responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<18 tahun	5	15,2	15,2	15,2
	18-25 tahun	28	84,8	84,8	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

Sebagian besar responden berada dalam rentang usia 18–25 tahun, yaitu sebanyak 28 orang (84,8%). Sementara itu, responden yang berusia di bawah 18 tahun berjumlah 5 orang (15,2%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah kalangan muda, yang umumnya merupakan mahasiswa aktif.

Tabel 1.3 Kebijakan efisiensi dapat mengurangi pemborosan dalam keuangan negara

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	6	18,2	18,2	18,2
	Tidak Setuju	4	12,1	12,1	30,3
	Netral	9	27,3	27,3	57,6
	Setuju	11	33,3	33,3	90,9
	Sangat Setuju	3	9,1	9,1	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

Sebanyak 11 responden (33,3%) menyatakan setuju bahwa kebijakan efisiensi dapat mengurangi pemborosan dalam keuangan negara, sementara 9 responden (27,3%) bersikap netral. Namun, terdapat pula 10 responden (30,3%) yang tidak setuju atau sangat tidak setuju. Hal ini mencerminkan pandangan yang cenderung positif, meski tidak dominan, terhadap manfaat efisiensi anggaran. Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menargetkan penghematan anggaran hingga Rp 306,7 triliun melalui pemangkasan belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah, sebagai upaya mencegah pemborosan dan defisit fiskal yang membengkak serta menjaga kestabilan keuangan negara dan efektivitas pembangunan (Mallongi, A. A., 2025).

Tabel 1.4 Kebijakan efisiensi anggaran telah menghemat dana tanpa mengurangi kualitas layanan Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	13	39,4	39,4	39,4
	Tidak Setuju	8	24,2	24,2	63,6
	Netral	9	27,3	27,3	90,9
	Setuju	2	6,1	6,1	97,0
	Sangat Setuju	1	3,0	3,0	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

Berdasarkan hasil survei terhadap 33 responden, mayoritas menunjukkan sikap kurang setuju terhadap pernyataan bahwa kebijakan efisiensi anggaran telah menghemat dana tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan. Sebanyak 39,4% responden menyatakan 'Sangat Tidak Setuju', dan 24,2% lainnya 'Tidak Setuju', sehingga total 63,6% responden memiliki pandangan negatif terhadap efektivitas kebijakan tersebut.

Sementara itu, 27,3% responden memilih 'Netral', yang mengindikasikan adanya keraguan atau ketidakpastian atas dampak efisiensi anggaran terhadap kualitas pendidikan. Hanya sebagian kecil responden yang memiliki pandangan positif, yaitu 6,1% 'Setuju' dan 3,0% 'Sangat Setuju', yang secara kumulatif hanya mencapai 9,1%. Tidak cukupnya anggaran untuk dana pendidikan dapat memperlambat pengembangan sebuah universitas, seperti menghambat penambahan fasilitas belajar di

kampus yang lebih kompeten dan perkembangan teknologi pendidikan, serta mengganggu pengembangan kurikulum yang sesuai (Christianingrum, 2018).

Tabel 1.5 Kebijakan efisiensi anggaran memberikan solusi yang cukup terhadap permasalahan anggaran di sektor pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	11	33,3	33,3	33,3
	Tidak Setuju	10	30,3	30,3	63,6
	Netral	5	15,2	15,2	78,8
	Setuju	4	12,1	12,1	90,9
	Sangat Setuju	3	9,1	9,1	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

Berdasarkan hasil survei terhadap 33 responden, mayoritas responden menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pernyataan bahwa kebijakan efisiensi anggaran mampu memberikan solusi yang cukup terhadap permasalahan anggaran di sektor pendidikan. Sebanyak 11 responden (33,3%) menyatakan sangat tidak setuju, dan 10 responden (30,3%) menyatakan tidak setuju, sehingga total 63,6% responden menolak pernyataan tersebut. Sementara itu, hanya 5 responden (15,2%) yang bersikap netral, dan sisanya, yaitu 4 responden (12,1%) menyatakan setuju, serta 3 responden (9,1%) sangat setuju. Anggaran pendidikan merupakan suatu hal yang krusial, alokasi anggaran yang diberikan oleh negara untuk pendidikan secara nasional hanya sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, sedangkan kebutuhan pendidikan tidak sedikit sehingga dengan anggaran tersebut belum tentu dapat memenuhi kebutuhan. Selain itu, universitas harus menjalankan kegiatan yang diprioritaskan dalam mendukung program dari pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf dan mutu pendidikan (Kuntadi, 2022).

Tabel 1.6 Bantuan yang diberikan setelah efisiensi anggaran masih memadai untuk menutupi biaya Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	7	21,2	21,2	21,2
	Tidak Setuju	14	42,4	42,4	63,6
	Netral	9	27,3	27,3	90,9
	Setuju	1	3,0	3,0	93,9
	Sangat Setuju	2	6,1	6,1	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

Berdasarkan hasil survei terhadap 33 responden, mayoritas responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pernyataan bahwa bantuan yang diberikan setelah kebijakan efisiensi anggaran masih memadai untuk menutupi biaya pendidikan. Hal ini terlihat dari 14 responden (42,4%) yang menyatakan tidak setuju dan 7 responden (21,2%) yang sangat tidak setuju, sehingga total sebanyak 63,6% responden menilai bahwa bantuan tersebut tidak cukup. Sebanyak 9 responden

(27,3%) menyatakan sikap netral, sedangkan hanya 2 responden (6,1%) yang menyatakan setuju dan 1 responden (3,0%) sangat setuju. Ketidakcukupan anggaran akan menghambat kesanggupan sistem pendidikan untuk menyediakan bantuan-bantuan lain yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan di kelas (Armadan, 2023).

Tabel 1.7 Kebijakan memastikan pemerataan akses pendidikan bagi mahasiswa dan keluarga kurang mampu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	11	33,3	33,3	33,3
	Tidak Setuju	8	24,2	24,2	57,6
	Netral	9	27,3	27,3	84,8
	Setuju	2	6,1	6,1	90,9
	Sangat Setuju	3	9,1	9,1	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

Berdasarkan hasil survei terhadap 33 responden, menunjukkan persepsi responden terhadap pernyataan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tetap memastikan pemerataan akses pendidikan bagi mahasiswa dan keluarga kurang mampu. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden bersikap skeptis terhadap klaim tersebut. Sebanyak 11 responden (33,3%) menyatakan sangat tidak setuju dan 8 responden (24,2%) menyatakan tidak setuju, sehingga total 57,6% responden menunjukkan ketidakpercayaan terhadap pemerataan akses pendidikan pasca efisiensi anggaran. Sebanyak 9 responden (27,3%) bersikap netral, yang mengindikasikan adanya keraguan atau ketidakpastian. Sementara itu, hanya sebagian kecil responden yang menyatakan setuju (6,1%) dan sangat setuju (9,1%). Jika anggaran pendidikan dipotong maka hal tersebut akan menimbulkan potensi bahwa bantuan pendidikan untuk keluarga kurang mampu akan berkurang. Dengan pemotongan anggaran pendidikan ini akan berpotensi mengganggu kestabilan keuangan dari keluarga kurang mampu, padahal pendidikan tinggi merupakan sarana mereka untuk meningkatkan taraf hidup (Edy & Yasin, 2024).

Tabel 1.8 Kebijakan efisiensi anggaran telah menghasilkan manfaat yang nyata bagi mahasiswa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	9	27,3	27,3	27,3
	Tidak Setuju	7	21,2	21,2	48,5
	Netral	15	45,5	45,5	93,9
	Setuju	1	3,0	3,0	97,0
	Sangat Setuju	1	3,0	3,0	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

Berdasarkan hasil survei terhadap 33 responden, menggambarkan persepsi responden terhadap pernyataan bahwa kebijakan efisiensi anggaran telah menghasilkan manfaat yang nyata bagi mahasiswa. Dari total 33 responden, sebanyak 9 orang (27,3%) sangat tidak setuju, dan 7 orang (21,2%)

tidak setuju, sehingga total 48,5% responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pernyataan tersebut. Sementara itu, 15 responden (45,5%) bersikap netral, menunjukkan bahwa hampir setengah dari responden tidak memiliki pandangan yang jelas apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata atau tidak. Hanya 1 orang (3,0%) yang setuju dan 1 orang (3,0%) yang sangat setuju, yang berarti tingkat persetujuan terhadap manfaat nyata dari kebijakan ini sangat rendah.

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan menyebabkan ketidakpercayaan di kalangan mahasiswa, karena mereka tidak melihat manfaat langsung dari kebijakan efisiensi yang diterapkan (Wulaningsih & Asriati, 2024).

Tabel 1.9 Kebijakan efisiensi anggaran disusun dengan mempertimbangkan aspirasi dari komponen masyarakat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	16	48,5	48,5	48,5
	Tidak Setuju	8	24,2	24,2	72,7
	Netral	7	21,2	21,2	93,9
	Setuju	1	3,0	3,0	97,0
	Sangat Setuju	1	3,0	3,0	100,0
	Total	33	100,0	100,0	

Berdasarkan hasil survei terhadap 33 responden, menunjukkan tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa kebijakan efisiensi anggaran disusun dengan mempertimbangkan aspirasi dari komponen masyarakat. Dari total 33 responden, sebagian besar atau 16 orang (48,5%) menyatakan sangat tidak setuju, dan 8 orang (24,2%) tidak setuju, sehingga total 72,7% responden tidak percaya bahwa aspirasi masyarakat diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan tersebut. Sementara itu, 7 orang (21,2%) bersikap netral, dan hanya 1 orang (3,0%) yang setuju, serta 1 orang (3,0%) yang sangat setuju terhadap pernyataan tersebut.

Hasil ini mencerminkan adanya keraguan atau ketidakpercayaan yang cukup tinggi dari responden terhadap proses perumusan kebijakan efisiensi anggaran, khususnya dalam hal partisipasi publik. Tingkat ketidaksetujuan yang tinggi mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat merasa tidak dilibatkan atau tidak didengar suaranya dalam proses tersebut. Implementasi kebijakan transparansi dalam bidang pendidikan belum dilaksanakan secara efektif, ditandai dengan rendahnya dukungan dari lingkungan dalam implementasi kebijakan dan kurangnya disetujui kelompok sasaran terhadap pengaplikasian kebijakan tersebut (Halik dkk, 2022).

4. PEMBAHASAN

Hasil survei menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan baru dipandang buruk oleh sebagian besar mahasiswa. Hanya 6,1% dari mereka yang menjawab setuju, dan 75,8% lainnya menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju terhadap kebijakan ini. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, tidak memberikan manfaat yang cukup. Selain itu, ketidaksetujuan ini diperkuat oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan; 72,7 persen orang yang menjawab mengatakan bahwa aspirasi publik tidak diperhatikan.

Sebagian besar responden merasa bahwa kebijakan efisiensi anggaran belum mampu menjamin kualitas dan pemerataan pendidikan. Sekitar 63,6% responden tidak percaya bahwa kebijakan ini bisa menghemat anggaran tanpa menurunkan mutu layanan pendidikan. Selain itu, 57,6% responden tidak sepakat bahwa efisiensi anggaran tetap mampu memastikan akses pendidikan merata, khususnya bagi mahasiswa dan keluarga kurang mampu. Ini menunjukkan bahwa penghematan anggaran cenderung dirasakan justru menghambat pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah.

Selain itu, tanggapan mahasiswa terhadap keberhasilan kebijakan ini didominasi oleh pendapat negatif. Hanya 9,1% dari mereka yang menjawab mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran telah memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, sedangkan hampir separuh dari mereka tidak merasakan manfaat apa pun. Selain itu, 63,6% dari mereka yang menjawab mengatakan bahwa bantuan pendidikan yang diberikan setelah efisiensi anggaran tidak cukup untuk menutupi biaya kuliah. Kesimpangan ini menunjukkan bahwa kebijakan belum dilaksanakan dengan baik dan tidak memenuhi kebutuhan utama mahasiswa.

Selain itu, pendapat mahasiswa tentang keberhasilan kebijakan ini mayoritas negatif. Hanya 9,1% dari mereka yang menjawab mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran telah memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, sedangkan hampir 50% dari mereka tidak merasakan manfaat apa pun. Selain itu, 63,6% dari mereka yang menjawab mengatakan bahwa bantuan pendidikan setelah efisiensi anggaran tidak cukup untuk menutupi biaya kuliah. Kesimpangan ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak memenuhi kebutuhan utama siswa.

5. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di era pemerintahan baru mendapat tanggapan kritis dari mahasiswa. Meskipun sebagian memahami tujuan efisiensi untuk mencegah pemborosan dan menjaga stabilitas fiskal, mayoritas responden merasa kebijakan ini berdampak negatif pada sektor pendidikan, khususnya terkait kualitas layanan, akses pendidikan bagi

mahasiswa kurang mampu, serta kecukupan bantuan pendidikan yang tersedia. Selain itu, responden menilai bahwa kebijakan ini kurang transparan dan tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Pemerintah dinilai belum cukup aktif memberikan penjelasan mengenai dampak kebijakan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya disusun secara lebih partisipatif dan komunikatif, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok rentan seperti mahasiswa. Evaluasi dan penyesuaian kebijakan diperlukan agar tujuan efisiensi tercapai tanpa mengorbankan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armadan, A., Mubarok, S. Al, & Tengah, L. (2023). Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Implementasi Manajemen Mutu. *Attractive : Innovative Education Journal*, 5(3), 129–139. <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>
- Astuti, E. P. (2019). Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Upaya Pelayanan Administrasi Akademik Mahasiswa Di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Awaludin, M., Mantik, H., & Fadillah, F. (2014). Penerapan Metode Servqual Pada Skala Likert Untuk Mendapatkan Kualitas Pelayanan Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, 10(1). <https://doi.org/10.35968/jsi.v10i1.990>
- Christianingrum, R. (2018). Pengaruh Anggaran Pendidikan Terhadap Pembangunan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Budget*, 3(2), 63–98.
- Edo, A., & Yasin, M. (2024). Dampak Kesenjangan Akses Pendidikan dan Faktor Ekonomi Keluarga terhadap Mobilitas Sosial. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial*, 2(3), 317–326.
- Gt. Indriani Puspitasari. (2023). Efisiensi Dan Efektivitas Realisasi Anggaran, Optimalisasi Dan Kinerja Keuangan. *Kindai*, 18(3), 444–455. <https://doi.org/10.35972/kindai.v18i3.913>
- Hafidzah, F., Lubis, P. A., Sihombing, S. K., & Purba, S. H. (2024). “Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kebijakan Pelayanan Kesehatan Di Kota Medan.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 5:71–85.
- Halik, W., Nawawi, J., & Rusli, A.M. (2022). Implementasi Kebijakan Transparansi Bidang Pendidikan Di Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 9(1).
- Kebijakan Efisiensi Anggaran Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025: Upaya Penghematan dan Stabilitas Fiskal Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 12(1), 45-60
- Kuntadi, C., & Dian Rosdiana. (2022). Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan

- Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 142–152. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2.1201>
- Mallongi, A. A., Aqsho, M., Athoriq, C., & Agustin, A. (2025). Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Di Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyyah. *Jurnal El-Thawalib*, 6(2), 212–226.
- Putra, W. (2020). *Efisiensi Anggaran Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat*. <http://feb.untan.ac.id/>
- Riswandi, A. (2020). Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas. *Gunahumas*, 3(1), 71–92. <https://doi.org/10.17509/ghm.v3i1.28403>
- Wulaningsih, R., Asrianti, N. (2024). Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4, 1723–1732.